

## **MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN MENUJU DESA MANDIRI DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU DENGAN SERAWAK MALAYSIA TIMUR (Studi Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu)**

### ***DEVELOPMENT PROGRAM IMPLEMENTATION MODEL TOWARDS AN INDEPENDENT VILLAGE IN THE BORDER AREA OF KAPUAS HULU DISTRICT AND SERAWAK, EAST MALAYSIA Study in South Putussibau District, Kapuas Hulu Regency***

Joko Triyono<sup>1</sup>, Eka Apriyani<sup>2</sup>, Ratu Zahirah Lutfie<sup>3</sup>, Syarif Redha Fachmi Al Qadrie<sup>4\*</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Tanjungpura

\*Surel: [redhalgadriy@fisip.untan.ac.id](mailto:redhalgadriy@fisip.untan.ac.id)

#### ***Abstract***

*The development program towards independent villages in the form of an economic recovery program financed from village funds has been implemented in South Putussibau District for several years. However, the results still did not reach the expected goals. Of the 14 villages, only 3 villages are categorized as independent villages. This indicates that the implementation of the village economic recovery program in South Putussibau District is still less effective. This research is aimed at obtaining a model for implementing the village economic recovery program in South Putussibau District. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The research results show that there are dominant factors that influence the effectiveness of the village economic recovery program in this sub-district, namely resources, leadership, disposition and the role of the public. It is recommended that village funds be used for productive development programs, harmonious cooperation between village officials, and public involvement in the village development process.*

***Keywords: Model, factors, dominant, effectiveness, implementation.***

#### **Abstrak**

Program pembangunan menuju desa mandiri berupa program pemulihan ekonomi yang dibiayai dari dana desa telah dilaksanakan di Kecamatan Putussibau Selatan selama beberapa tahun. Namun hasilnya masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Dari 14 desa hanya 3 desa yang berkategori desa mandiri. Ini mengindikasikan bahwa implementasi program pemulihan ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Selatan masih kurang efektif. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan model implementasi program pemulihan ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas program pemulihan ekonomi desa di kecamatan ini yaitu faktor sumber daya, kepemimpinan, disposisi dan peran publik. Disarankan, dana desa dimanfaatkan untuk program pembangunan yang produktif, kerja sama yang harmonis antar perangkat desa, keterlibatan publik dalam proses pembangunan desa.

**Kata Kunci: Model, faktor, dominan, efektivitas, implementasi.**

Diajukan : 22 Januari 2024      Direvisi : 09 Desember 2024      Diterima : 10 Desember 2024

## Pendahuluan

Mayoritas orang Indonesia tinggal di desa, desa memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, wilayah perkotaan lebih banyak dibangun daripada perdesaan. Jadi, ada ketidakseimbangan dalam kemajuan atau perbedaan yang dalam antara kota dan desa. Akibatnya, terjadi urbanisasi yang cukup besar, yang mengakibatkan penumpukan penduduk dan masalah di perkotaan. Sumber pembiayaan pembangunan desa harus sangat besar untuk mempercepat pembangunan perdesaan. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum selama proses pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah telah menetapkan kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber sebagian dari pendapatan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa juga melanjutkannya.

Menurut peraturan ini, pemerintah harus memberikan dana kepada setiap desa di Indonesia setiap tahun untuk Dana Desa. Pemerintah desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk mempercepat proses pembangunan desa mereka sehingga mereka dapat tumbuh dan mandiri, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan masyarakat. Akibatnya, sejak anggaran tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa dan PDTT) adalah lembaga yang berwenang untuk mengatur dan membagi Dana Desa yang dialokasikan di APBN. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Amalia et al., 2023). Semua desa bertanggung jawab untuk meminimalkan dan menangani bencana, baik alam maupun non-alam (Usmulyadi et al., 2024).

Untuk membiayai berbagai program pembangunan desa, permen desa ini akan membantu implementor dan stakeholder memanfaatkan dana desa. Program pembangunan desa ini harus berhasil untuk mengubah jumlah desa mandiri yang semakin meningkat. Kapuas Hulu adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Ini berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia Timur dan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Data yang dikumpulkan oleh Bupati Kapuas Hulu dari rakor camat tahun 2019 yang mencakup 276 desa di Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan bahwa 125 desa tetap dalam status Desa Sangat Tertinggal dan 99 desa tetap dalam status Desa Tertinggal.

Dan pada Tahun 2021 jumlah desa yang berstatus desa mandiri baru mencapai 29 desa (10,51 %). Sehingga di Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar desanya masih tergolong desa yang belum mandiri. Meskipun Dana Desa ini telah digelontorkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015. Rendahnya capaian status desa mandiri di Kabupaten Kapuas Hulu ini, maka Bupati Kapuas Hulu menginstruksikan penggunaan dana desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa guna mempercepat terwujudnya peningkatan status desa sebagai desa mandiri di Kabupaten Kapuas Hulu. Renahnya capaian status desa mandiri di Kabupaten Kapuas Hulu ini mengindikasikan bahwa implementasi program pembangunan menuju desa mandiri di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikatakan kurang efektif. Efektivitas program pembangunan desa di Kabupaten Kapuas Hulu ini sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor atau variabel (Rahman et al, 2021).

Program pembangunan menuju desa mandiri dapat menjadi solusi di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, terutama di Kecamatan Putussibau Selatan, yang berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan Timur dan Negara Serpihan. Para ahli telah berbicara tentang model pelaksanaan kebijakan publik untuk menentukan seberapa efektif kebijakan publik. Berdasarkan Permen Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Dana Desa hanya dapat digunakan untuk tiga tujuan: pemulihan ekonomi nasional di bawah kewenangan desa; program prioritas nasional di bawah kewenangan desa; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Selain itu, pandemi COVID-19 merusak ekonomi nasional, termasuk ekonomi perdesaan. Studi ini berfokus pada program pemulihan ekonomi desa di kecamatan Putussibau Selatan, yang merupakan bagian dari banyak kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada model implementasi program pemulihan ekonomi yang mengarah pada desa mandiri di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Fokus penelitian adalah bagaimana program pemulihan ekonomi desa dapat diterapkan di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu? Salah satu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Mengevaluasi setiap komponen yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pemulihan ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu; dan b. Memberikan gambaran tentang model pelaksanaan program pemulihan ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

## **Kajian Pustaka**

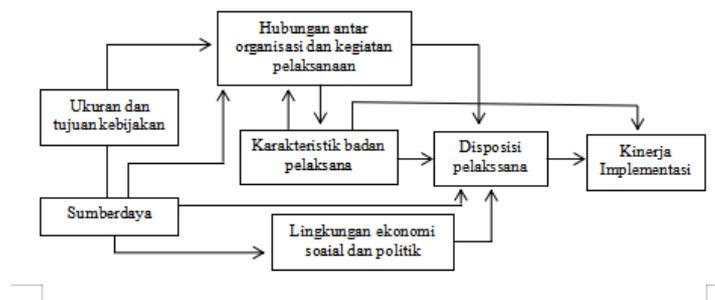
### **Implementasi Kebijakan Publik**

Evaluasi, implementasi, dan implementasi adalah langkah-langkah penting dalam proses kebijakan, dan tahap implementasi adalah yang paling penting untuk diperhatikan. Ini dapat dipahami karena kebijakan, meskipun dibuat dengan baik, tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan dengan baik. Peneraksanaan dan pembuatan undang-undang memiliki nilai yang sama, jika tidak lebih, daripada keduanya. Selama proses kebijakan, penerapan kebijakan sangat penting—bahkan lebih dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan akan tetap menjadi model atau harapan dalam tas file sampai diterapkan. Tidak peduli seberapa kuat suatu kebijakan, jika tidak diterapkan, itu tidak akan membawa manfaat apa pun. Oleh karena itu, perlu diakui bahwa tahap implementasi adalah tahap yang aneh dan sangat penting dalam proses kebijakan publik. Menurutnya, "Para ahli mengatakan bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini sebenarnya baru mampu untuk mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan" (Wahab, 1990). Oleh karena itu, tahap implementasi adalah bagian yang sangat penting dari proses pembuatan kebijakan publik. Menurut Tachjan (2008), implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan penggunaan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan. Istilah "implementasi" secara etimologis berarti tindakan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan penggunaan sarana atau alat untuk memperoleh hasil. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi pada dasarnya adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program sehingga tujuan yang

diharapkan dari program dapat tercapai. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi didefinisikan sebagai keberhasilan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program sehingga tujuan yang diharapkan dari program dapat tercapai (Supiandi & Elyta, 2023).

Terdapat dua pendekatan untuk menentukan efektivitas implementasi suatu program yaitu: 1. Kepatuhan (compliance). Melalui pendekatan kepatuhan, efektifitas implementasi kebijaksanaan dilihat dari apakah implementor mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan. 2. Perspektif (what's happening). Melihat efektifitas implementasi dari berbagai hal yang terjadi saat implementasi berlangsung. Pendekatan ini didasarkan pada beragamnya variabel yang berpengaruh terhadap efektifitas program (Wibawa, 1990). Pendapat Wibawa tersebut dapat diartikan bahwa efektivitas implementasi suatu program dapat dilihat dari kepatuhan para implementor kebijakan terhadap berbagai aturan yang berlaku (Elyta & Kartikasari, 2021). Selanjutnya agar implementasi suatu program dapat berjalan dengan efektif, maka dalam proses implementasi suatu program perlu diperhatikan variabel-variabel yang sekiranya akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program tersebut (Elyta & Herlan, 2021). 2. Model Implementasi Kebijakan Publik Kebijakan pemerintah yang telah diformulasikan dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk diimplementasikan (Jamaliah et al, 2022).

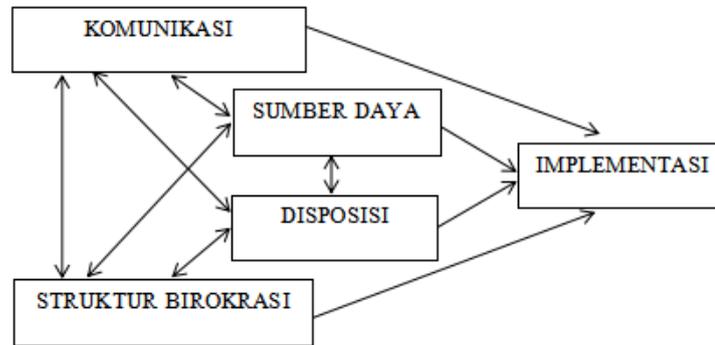
Program pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dilaksanakan dengan baik karena kebijakan publik tidak dilaksanakan (Chainar et al, 2023). Menurut Van Metter dan Van Horn, banyak variabel bebas yang saling berkaitan menghalangi hubungan antara kebijakan dan kinerja. A. Tujuan kebijakan, standar, dan ukuran; b. Sumber-sumber kebijakan; c. Ciri-ciri atau karakteristik badan pelaksana; d. Komunikasi dan kegiatan pelaksanaan antar organisasi terkait; e. Pendapat pelaksana; dan f. Lingkungan politik, ekonomi, dan sosial (Wahab, 2016).



Sumber : Subarsono, 2013.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Tachjan, 2008), proses implementasi dipengaruhi oleh lima faktor di luar kebijakan: kondisi sosial ekonomi dan teknologi; dukungan publik; sikap dan sumber kelompok; dukungan dari pejabat atasan; dan komitmen dan kemampuan pejabat tinggi untuk kepemimpinan. Edwards berpendapat bahwa pemilih harus tahu apa yang harus mereka lakukan agar kebijakan dapat diterapkan (Winarno, 2002). Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan bergantung pada seberapa jelas itu. Selain itu, Edward III membuat model

implementasi kebijakan yang mencakup empat elemen yang memengaruhi implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun teori yang disebutkan di atas dapat diterima (Widodo, 2017), penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau efektifitas pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan adalah 1). Kedua adalah komunikasi dan dukungan pemerintah; ketiga adalah sumber daya; empat adalah struktur birokrasi; lima adalah sikap pelaksana; enam adalah kepemimpinan; tujuh adalah peran dan dukungan publik; dan delapan adalah kondisi sosial ekonomi dan teknologi (Aisyah et al., 2022). Model yang diusulkan oleh Edward III untuk penerapan kebijakan yang adalah sebagai berikut:



## Metode Penelitian

### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskriptifkan tentang model implementasi kebijakan khususnya Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali permasalahan dan memahami fenomena-fenomena proses implementasi dan juga mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan Program Pembangunan menuju Desa Mandiri di Kecamatan Putussibau Selatan secara mendalam dan dalam kondisi serta situasi (setting) yang alamiah. Pendekatan kualitatif ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi maupun memprediksi apa yang akan terjadi (Elyta et al, 2024).

### 2. Penentuan Informan

Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan ini melibatkan berbagai pihak selaku implementors. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalah pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Kantor Kecamatan Putussibau Selatan, Perangkat Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat Desa, dan masyarakat khususnya 2 desa sampel dalam penelitian ini yaitu desa Melapi yang berstatus desa mandiri dan desa Ingko Tambe yang berstatus belum mandiri (Al Qadrie et al, 2023). Tehnik sampling yang

digunakan adalah purposive sampling dan snowball. Yang menjadi subyek penelitian adalah 1). Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, 2). Kepala Seksi Pembangunan Kantor Camat Putussibau Selatan, 3) Kepala Desa Melapi, 4). Kepala BPD Desa Melapi, 5). Tokoh masyarakat Desa Melapi 2 orang, 6). Kepala Desa Ingko Tambe, 7). Kepala BPD Inko Tambe, 8). Tokoh masyarakat desa Ingko Tambe 2 orang, 9). Pendamping Desa Kecamatan Putussibau Selatan.

### **3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan utama wawancara adalah untuk menggali informasi mengenai pandangan informan atas fokus penelitian yang berkaitan dengan proses implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan khususnya di Desa Melapi dan desa Ingko Tambe. Teknik wawancara menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan maksud agar wawancara dapat berjalan secara fleksibel dan peneliti dapat menggali informasi secara bebas dan mendalam. Untuk memperlancar kegiatan wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu berupa panduan wawancara dan recorder. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi non partisipan untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi pemerintahan dan hasil pembangunan desa di Melapi dan Ingko Tambe. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek penelitian, seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan proses pembangunan Desa, Profil Desa, APBDes dan dokumen lain yang relevan dan tersedia pada pihak-pihak terkait tersebut dipinjam untuk dicopy (Elyta, 2021).

### **4. Analisis Data**

Data primer maupun data sekunder yang diperoleh peneliti baik melalui wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi, dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ini adalah reduksi data, display data dan verifikasi. Reduksi data dimaksudkan untuk mensortir data dengan cara memilah-milah, mengklasifikasi dan menambahkan data yang diperlukan. Data yang sejenis dikumpulkan dalam satu kelompok agar dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif atas kelompok data tersebut, data yang tidak relevan diabaikan. Display data adalah langkah yang ditempuh peneliti dengan menyajikan data dalam bentuk narasi sesuai dengan pola dan klasifikasinya sehingga diperoleh paparan informasi yang lengkap dan jelas dari fokus penelitian. Sedangkan verifikasi data adalah suatu langkah peneliti untuk mengecek kembali data yang telah dipaparkan secara komprehensif dan pada akhirnya merumuskan kesimpulan secara singkat dan jelas. Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan atas obyek kajian dalam penelitian ini. Sedangkan analisis data untuk mengetahui faktor penyebab atau pengaruh dari masing-masing aspek dalam penelitian ini dilakukan dengan studi komperatif yakni dengan membandingkan kondisi masing-masing aspek penelitian dari dua desa selaku sampel yaitu Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe Kecamatan

Putussibau Selatan (Antir et al, 2024).

## 5. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya. Triangulasi sumber digunakan untuk melakukan pengecekan (check-recheck) data dari berbagai sumber. Misalnya, pengecekan data melalui teknik pengumpulan data wawancara dibandingkan dengan data dari observasi atau dokumen, atau sebaliknya. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang dapat dipercaya dan kredibel.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Putussibau Selatan, namun mengingat banyaknya desa di kecamatan ini, maka lokasi penelitian ini lebih difokuskan pada desa yang berkategori belum mandiri yaitu desa Ingko Tambe dan desa yang sudah termasuk desa mandiri yaitu Desa Melapi. Mengingat pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi program ini melibatkan beberapa pihak, maka lokasi penelitian tidak hanya terbatas pada desa sampel saja. Lokasi pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dan Kantor Kecamatan Putussibau Selatan (Elyta et al, 2022).

## PEMBAHASAN

### Analisis Model Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan

#### 1. Efektivitas Program Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri

Program-program pembangunan desa yang didanai oleh Pemerintah bersumber dari Dana Desa dan telah diimplementasikan pada desa-desa di wilayah kecamatan Putussibau Selatan sejak tahun 2015. Meskipun program-program pembangunan yang didanai oleh dana desa tersebut telah berlangsung beberapa tahun, namun hingga tahun 2020 hasilnya belum memenuhi harapan, yakni masih kecilnya jumlah desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang telah berstatus sebagai Desa Mandiri (Elyta et al, 2023). Selain itu, Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2021, yang mengatur cara setiap desa di Kabupaten Kapuas Hulu akan menerima dana pada tahun anggaran 2021. Peraturan ini memperhitungkan perubahan status desa, peningkatan jumlah penduduk miskin, dan skor indeks desa membangun untuk menghitung hasil pembangunan (Ningrum et al., 2024). Pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu program pembangunan desa di Putussibau Selatan. Meningkatkan kapasitas desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengubah status desa menjadi desa yang mandiri (Elyta et al., 2022). Dengan menggunakan tolok ukur capaian desa mandiri, tampaknya program pembangunan desa di Kecamatan Putussibau Selatan tidak berjalan dengan baik. Ini didasarkan pada fakta bahwa hanya 3 desa (atau 21,43% dari 14 desa di wilayah kecamatan Putussibau Selatan) telah diakui sebagai desa mandiri (Olifiani et al., 2023).

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Desa Menurut teori-teori yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa meskipun ada perbedaan, teori-teori yang berbeda tetap berlaku. Penelitian tim menemukan beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan program Program Pemulihan Ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Selatan, yaitu: 1). Komunikasi, kedua, dukungan pemerintah, tiga, sumber daya, empat, struktur birokrasi, lima, sikap pelaksana, enam, kepemimpinan, tujuh, peran publik dan delapan. Faktor teknologi dan sosial ekonomi (Haryaningsih et al., 2023).

**a. Pengaruh Komunikasi Terhadap Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan.**

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas implementasi program pemulihan ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Selatan adalah komunikasi. Faktor komunikasi ini memiliki hubungan dengan efektivitas implementasi program pemulihan ekonomi desa yang bersifat positif dan kausal, artinya bahwa komunikasi merupakan faktor penyebab), sedangkan efektivitas Implementasi program pemulihan ekonomi desa merupakan faktor akibat. Agar implementasi program pembangunan tersebut berhasil dengan baik, maka program tersebut seyogyanya dikomunikasikan dengan baik pula. Bagi pelaksana program (aparatur pemerintah desa) wajib memahami program pemulihan ekonomi desa yang didanai dari Dana Desa (Sundari et al, 2023).

Di tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, Program Pembangunan Desa dikomunikasikan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu kepada aparatur ataupun perangkat desa dilakukan secara berjenjang melalui pihak apartur Kantor Kecamatan Putussibau Selatan, yang selanjutnya pihak Kantor Kecamatan Putussibau Selatan melanjutkan dengan mengkomunikasikan Program Pembangunan tersebut kepada pihak desa selaku implementor (Aryanti et al, 2023). Disamping itu, Program Pembangunan Desa juga dikomunikasikan dengan cara melalui pertemuan pada saat pelaksanaan Musrembang di Tingkat Desa. Program pembangunan desa juga dikomunikasikan oleh Pendamping Kecamatan Putussibau Selatan yang berperan membantu dan atau memberikan pendampingan dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Elyta & Razaq, 2019).

Beberapa aspek program pembangunan desa yang dikomunikasikan kepada perangkat desa sebagai implementor di tingkat seperti : a). Dasar hukum program pembangunan desa yang didanai bersumber dari Dana Desa; b). Tujuan program pembangunan desa; c). Penyusunan rencana program pembangunan desa; d). Mekanisme pelaksanaan pembangunan desa; dan e). Pertanggungjawaban atau pelaporan kegiatan dan keuangan program pembangunan desa. Aspek transmisi dalam komunikasi sangat penting mengingat pesan yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kapuas Hulu harus sampai kepada implementor program pembangunan di tingkat desa (Rahmaniah et al, 2022).

Proses transmisi komunikasi menjadi tidak ada artinya jika para implementor program pembangunan desa kurang memahami terhadap pesan atau materi yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Para implementor program pemulihan ekonomi desa di Desa Melapi pada dasarnya sudah paham terhadap Program Pembangunan Desa terutama Program Pemulihan Ekonomi Desa (Elyta et al, 2021) Demikian halnya dengan para implementor program pemulihan ekonomi desa di Desa Ingko Tambe. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman implementor terhadap Program Pembangunan Desa terutama Program Pemulihan Ekonomi Desa antara Desa Melapi dengan Desa Ingko Tambe pada dasarnya tidak ada perbedaan yang berarti (Martoyo et al, 2021).

Meskipun tidak ada perbedaan yang berarti, tetapi dilihat dari keberhasilan pembangunan jika diukur dari status desa maka terdapat perbedaan. Desa Melapi telah berhasil melaksanakan Program Pembangunan Desa yang dibuktikan dengan adanya perubahan status desa menjadi Desa Mandiri (Fathun & Elyta, 2023). Sedangkan desa Ingko Tambe dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil melaksanakan Program Pembangunan Desa, karena belum mencapai perubahan status sebagai Desa Mandiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa faktor komunikasi ini kurang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan (Almuthahar et al, 2019).

#### **b. Pengaruh Dukungan Pemerintah Terhadap Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan**

Berhasilnya program pemulihan ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Selatan juga dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, terutama dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dukungan pemerintah pusat terutama berupa peraturan, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa.

Mengingat bahwa Program Pemulihan Ekonomi Desa adalah program pemerintah pusat yang didanai oleh Dana Desa, wajar jika Pemerintah Pusat membuat peraturan agar para implementor program dapat melaksanakannya dengan lebih mudah. Selain peraturan dan dana desa, pemerintah pusat juga membantu program pembangunan desa melalui pendamping desa. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dibantu oleh pendamping ini oleh masyarakat desa, kelembagaan, dan individu (Elyta et al., 2020). Tujuan pendampingan ini adalah untuk memastikan bahwa Program Pembangunan Desa yang didanai dari Dana Desa berjalan dengan baik.

Meskipun dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membantu pemerintah pusat dan desa melaksanakan Program Pembangunan Desa, peran Pemerintah Kabupaten meliputi membantu Pemerintah Pusat mengkomunikasikan Program Pembangunan Desa yang didanai dari Dana Desa kepada Pemerintah Desa dan membantu Pemerintah Pusat mengumpulkan dana dari Desa.

Dalam hal pelaksanaan Program Pembangunan Desa, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten telah memberikan dukungan yang memadai kepada pemerintah Desa Melapi dan Ingko Tambe. Oleh karena itu, jelas bahwa Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe sama-sama menerima dukungan pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa elemen yang diberikan oleh pemerintah kurang berpengaruh terhadap seberapa efektif Program Pembangunan Desa, terutama Program Pemulihan Ekonomi di Kecamatan Putussibau Selatan (Elyta et al., 2023). Mengingat bahwa Program Pemulihan Ekonomi Desa adalah program pemerintah pusat yang didanai oleh Dana Desa, wajar jika Pemerintah Pusat membuat peraturan agar para implementor program dapat melaksanakannya dengan lebih mudah.

Selain peraturan dan dana desa, pemerintah pusat juga membantu program pembangunan desa melalui pendamping desa. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dibantu oleh pendamping ini oleh masyarakat desa, kelembagaan, dan individu (Elyta et al., 2020). Tujuan pendampingan ini adalah untuk memastikan bahwa Program Pembangunan Desa yang didanai dari Dana Desa berjalan dengan baik. Meskipun dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membantu pemerintah pusat dan desa melaksanakan Program Pembangunan Desa, peran Pemerintah Kabupaten meliputi membantu Pemerintah Pusat mengkomunikasikan Program Pembangunan Desa yang didanai dari Dana Desa kepada Pemerintah Desa dan membantu Pemerintah Pusat mengumpulkan dana dari Desa.

Dalam hal pelaksanaan Program Pembangunan Desa, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten telah memberikan dukungan yang memadai kepada pemerintah Desa Melapi dan Ingko Tambe. Oleh karena itu, jelas bahwa Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe sama-sama menerima dukungan pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa elemen yang diberikan oleh pemerintah kurang berpengaruh terhadap seberapa efektif Program Pembangunan Desa, terutama Program Pemulihan Ekonomi di Kecamatan Putussibau Selatan (Elyta et al., 2023).

**c. Pengaruh Sumber Daya Terhadap Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan.**

Dalam hubungannya dengan Program Pemulihan Ekonomi Desa, faktor sumber daya ini dapat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya keuangan serta sumber daya peralatan. Faktor sumber daya memiliki hubungan yang bersifat positif dengan efektivitas implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa. Dalam hal ini jika sumber daya yang digunakan dalam program tersebut sangat memadai maka implementasi program tersebut juga akan sangat efektif. Sebaliknya jika sumber daya yang digunakan dalam program tersebut kurang memadai maka implementasi program tersebut juga akan kurang efektif (Elyta et al, 2018).

## 1. Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia sangat penting untuk pengembangan organisasi. Karena sumber daya manusia adalah anggota organisasi, mereka pada dasarnya bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan organisasi agar tujuannya dapat dicapai dengan baik. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan melihat tingkat pendidikan yang dimiliki individu tersebut; lebih tinggi tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia lebih tinggi, dan lebih rendah tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia lebih rendah (Elyta et al., 2023).

Tingkat pendidikan aparatur desa di Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe berdasarkan data di ke dua desa tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Secara terprinci tingkat pendidikan aparatur desa di Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe seperti tertera pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1  
 Tingkat Pendidikan Penjabat Pemerintah Desa  
 Di Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe  
 Tahun 2022

No.	Jabatan	Tingkat Pendidikan	
		Desa Melapi	Desa Ingko Tambe
1	Kepala Desa	SLTA	SLTA
2	Sekretaris Desa	SLTA	S-1
3	Kaur Pemerintahan	SLTA	S-1
4	Kaur Pembangunan	SLTA	S-1
5	Kaur Pemberdayaan Masyarakat	SLTA	SLTA
6	Kaur Kesejahteraan Masyarakat	SLTA	S-1
7	Kaur Umum	SLTA	SD
8	Kaur Keuangan	S-1	SLTA

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2023

Data pada tabel 1 di atas dapat dipahami bahwa, kualitas aparatur desa yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe terdapat perbedaan yang berarti terutama jika dilihat dari tingkat pendidikannya. Kondisi di Desa Melapi dapat dikatakan bahwa jalannya pemerintahan dan pembangunan hanya didukung oleh 1 orang (12,5 %) aparatur desa yang berkualitas baik, sebagian besar (87,5 %) merupakan sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup baik (Elyta et al, 2023). Sedangkan di Desa Ingko Tambe, Jalannya pemerintahan dan pembangunan didukung oleh aparatur desa yang berkualitas baik yakni berpendidikan sarjana (S-1) berjumlah 4 orang (50 %). Dan hanya 1 orang (12,5 %) saja yang kualitasnya kurang baik karena hanya berpendidikan SD. Dengan demikian di desa Ingko Tambe ini jalannya pemerintahan dan pembangunan didukung oleh 37,5 % aparatur desa yang kualitasnya cukup baik yaitu berpendidikan SLTA (Nani et al, 2024).

Gambaran di atas menunjukkan kondisi yang unik mengingat meskipun jalannya pemerintahan dan pembangunan hanya didukung oleh aparatur desa yang sebagian besar

berkualitas cukup baik, namun Program Pembangunan yang diimplementasikan di Desa Melapi ini telah berhasil dengan baik (efektif) yakni bestatus desa mandiri (Elyta, 2020). Sedangkan di Desa Ingko Tambe yang jalannya pemerintahan dan pembangunan desa telah didukung oleh sebagian besar aparatur desa yang berkualitas baik yakni berpendidikan sarajan (S-1), namun demikian program pembangunan desa yang diimplementasikan di desa Ingko Tambe ini dapat dikatakan belum berhasil dengan baik (belum efektif). Mengingat desa Ingko Tambe ini belum berstatus desa mandiri. Dengan demikian sumber daya manusia kurang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Program Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan (Islam et al, 2023).

## 2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran atau keuangan juga merupakan salah satu sumber daya yang berkorelasi positif terhadap keberhasilan program pembangunan. Mengingat bahwa sumber daya anggaran berfungsi sebagai sarana pembiayaan pembangunan yang merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan (Elyta, 2021). Bagi Pemerintah Desa, sumber daya anggaran utama yang digunakan untuk membiayai program pembangunan desa bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Desa. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar Pemerintah Desa memiliki sumber daya anggaran yang sangat terbatas, jika hanya bersumber dari Pendapatan Asli Desa (P.A.Des).

Berdasarkan data yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 menunjukkan bahwa Pendapatan Desa Melapi dan Pendapatan Desa Ingko Tambe pada dasarnya terdapat perbedaan yang berarti. Pendapatan Desa Melapi sebesar Rp. 1.483.300.642,26 sedangkan pendapatan Desa Ingko Tabe sebesar Rp. 1.176.156.479,53. Ini menunjukkan perbedaan sebesar Rp. 306.904.163,73 (26,09 %) dari pendapatan Desa Ingko Tambe atau 20,69 % pendapatan desa Melapi (Elyta & Darmawan, 2021).

Perbedaan pendapatan dapat dikatakan lebih dari 20 % ini nampaknya berpengaruh terhadap capaian hasil pembangunan di ke dua desa tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa besarnya sumber daya anggaran/keuangan desa berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Secara lebih mendetail gambaran selengkapnya mengenai perbedaan pendapatan desa antara desa Melapi dengan Desa Ingko Tambe terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2  
 Pendapatan Pemerintah Desa Di Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe  
 Tahun 2022

No.	Keterangan	Desa Melapi	Desa Ingko T.	Perbedaan
1	PAD	4.083.000,00	550.000,00	3.533.000,00
2	Pend. Transfer	1.477.833.000,26	1.174.560.000,00	303.273.000,00
3	Pend. lain-lain	184.642,26	86.479,53	98.162,73
4	Silpa Th Lalu	1.200.000,00	-	-
	Jumlah	1.483.300.642,26	1.176.156.479,53	306.904.163,73

Sumber : APBDes Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe, diolah 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas dapat dipahami bahwa Pendapatan Asli Desa Melapi relatif masih sangat kecil yakni hanya 0,28 % dari besarnya pendapatan desa yang diperoleh dari pendapatan transfer. Demikian juga dengan Desa Ingko Tambe, Pendapatan Asli Desanya juga relatif masih sangat kecil yakni hanya 0,05 %. Rendahnya Pendapatan Asli Desa ini menjadi bukti bahwa sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan desa masih sangat tergantung pada dana yang bersumber dari pendapatan transfer yakni dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pemerintah Pusat yang berupa Dana Desa (DD) (Rahmaniah et al, 2023). Meskipun masih sangat kecil Pendapatan Asli Desa yang diperoleh Desa Melapi menunjukkan gejala yang relatif baik jika dibandingkan dengan Desa Ingko Tambe. Jika dilihat dari unsur belanja, pendapatan desa yang dibelanjakan untuk penunjang kegiatan pemerintahan ataupun proyek-proyek pembangunan desa tercantum pada APBDes seperti pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3  
 Belanja Pemerintah Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe Tahun 2022

No.	Keterangan	Desa Melapi	Desa Ingko T.	Perbedaan
1	Belanja Pegawai	342.685.560,00	291.521.640,00	51.163.920,00
2	Belanja Barang & Jasa	608.545.282,26	487.664.839,63	120.880.442,53
3	Belanja Modal	420.469.800,00	9.790.000,00	410.679.800,00
4	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	386.000.000,00	274.400.000,00
	Jumlah	1.484.500.064,26	1.176.156.479,53	308.343.584,73

Sumber : APBDes Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe, diolah 2023

Berdasarkan data pada Tabel 3 tersebut, pendapatan desa dibelanjakan pada berbagai item yang dapat dikelompokkan menjadi 4 unsur yaitu Belanja Pegawai, Belanja barang & jasa, belanja modal dan belanja tidak terduga. Tabel 3 tersebut juga menunjukkan bahwa antara Desa melapi dan Desa Ingko Tambe terdapat perbedaan yang berarti tentang besarnya belanja keseluruhan dan pada masing-masing unsur tersebut (Elyta et al, 2021). Pengeluaran keuangan desa dari unsur belanja barang & jasa antara Desa Melapi dengan Desa Ingko Tambe terdapat perbedaan yang cukup berarti yakni sebesar Rp. 120.880.442,53. Pemerintah Desa Melapi menganggarkan mencapai Rp. 608.545.282,26 sedangkan di Pemerintah Desa Ingko Tambe menganggarkan sebesar Rp. 487.664.839,63.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam hal prioritas pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Desa Melapi lebih baik jika dibandingkan dengan di Pemerintah Desa Ingko Tambe. Kemudian jika dilihat dari pengeluaran keuangan pemerintah desa pada unsur belanja modal, antara Desa Melapi dengan Desa Ingko Tambe terdapat perbedaan yang berarti yakni mencapai Rp. 410.679.800,00. Pemerintah Desa Melapi telah menganggarkan pada belanja modal mencapai Rp. 420.469.800,00, sedangkan Pemerintah Desa Ingko Tambe hanya menganggarkan sebesar Rp. 9.790.000,00.

Kondisi ini mengandung arti bahwa Pemerintah Desa Melapi sangat memperhatikan

kegiatan pembangunan melalui program-program pembangunan desa yang dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan Pemerintah Desa Ingko Tambe dapat dikatakan kurang memperhatikan program-program pembangunan desa. Pada belanja tidak terduga, antara Pemerintah Desa Melapi dengan Pemerintah desa Ingko Tambe juga memperlihatkan perbedaan yang berarti yakni mencapai Rp. 274.400.000,00. Pemerintah Desa Melapi belanja tidak terduga hanya mencapai Rp. 111.600.000,00 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Pemerintah Desa Ingko Tambe yang menapai Rp. 386.000.000,00.

Kondisi yang demikian ini dapat dipahami bahwa Pemerintah Desa Ingko Tambe kurang memanfaatkan sumber pendapatan keuangan desanya untuk membiayai kegiatan atau program-program pembangunan desa. Sedangkan desa Melapi sepertinya lebih memprioritaskan pada pada kegiatan atau program-program pembangunan desa. Kondisi ini nampaknya berpengaruh terhadap capaian tujuan pembangunan desa yakni status sebagai Desa Mandiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sumber daya keuangan desa berpengaruh terhadap efektivitas Program Pembangunan Desa di Kecamatan Putussibau Selatan.

### **3. Sumber Daya Peralatan**

Sumber daya peralatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam mendukung tercapainya kondisi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan ataupun proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Putussibau Selatan. Berkaitan dengan kegiatan proyek-proyek pembangunan dilakukan di Desa Melapi dan di Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan, semua proyek pembangunan di desa-desa ini adalah proyek yang sifatnya pada karya, artinya proyek-proyek pembangunan tersebut tidak menggunakan peralatan yang berteknologi tinggi, tetapi menggunakan peralatan sederhana yang biasa digunakan oleh penduduk setempat. Hal ini dikarenakan bahwa proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Putussibau Selatan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja di desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di ke dua desa tersebut tidak terdapat perbedaan yang berarti dalam hal penggunaan peralatan pada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan di desa tersebut.

### **4. Sumber Daya Kewenangan**

Pada dasarnya kewenangan merupakan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu umumnya dilakukan oleh pucuk pimpinan dalam suatu organisasi. Pendelegasian wewenang kepada unsur pimpinan yang lebih rendah ini pada dasarnya juga merupakan penyerahan tanggung jawab dari pimpinan kepada unsur pimpinan yang lebih rendah. Namun demikian bukan berarti bahwa seluruh kewenangan dan tanggung jawab pimpinan dilimpahkan sepenuhnya kepada unsur pimpinan yang lebih rendah, sehingga pimpinan lepas dari tanggung jawabnya.

Dalam hubungannya dengan pelimpahan wewenang terkait dengan program-program pembangunan desa yang dilaksanakan wilayah di Kecamatan Putussibau Selatan, antara Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe terdapat

perbedaan yang berarti. Dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terutama dalam menentukan masyarakat sebagai kelompok sasaran penerima program BLT bukan merupakan hal yang sederhana mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat sebagai kelompok sasaran penerima program BLT harus memenuhi persyaratan seperti yang telah ditentukan. Namun demikian masyarakat berkeinginan semua mempunyai hak yang sama sebagai penerima Program BLT tersebut.

Kondisi yang demikian ini pemimpin perlu mengambil keputusan dengan tepat. Oleh karena yang mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari masyarakat sebagai kelompok sasaran penerima program BLT adalah RT atau Kepala Dusun, maka Kepala Desa Melapi melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dusun untuk menentukan masyarakatnya sebagai kelompok sasaran penerima program BLT. Sedangkan di Desa Ingko Tambe, penentuan masyarakat sebagai kelompok sasaran penerima Program BLT dilakukan langsung oleh Kepala Desa Ingko Tambe tanpa dilakukan pendelegasian wewenang kepada Kepala Dusun.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sumber daya kewenangan berpengaruh terhadap keberhasilan atau efektivitas implementasi Program Pembanguna Desa khususnya Program Pemulihan Ekonomi Desa.

#### **d. Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan**

Faktor lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau efektivitas implementasi Program Pembangunan Desa adalah struktur birokrasi. Gambaran tentang struktur birokrasi tidak jauh berbeda dengan gambaran struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ini tergambar pembagian kerja dan hubungan kerja antara bidang atau bagian yang satu dengan bidang atau bagian yang lain.

Di samping itu juga menggambarkan herarkhi hubungan antara atasan dengan bawahan, sehingga besar kecilnya organisasi terlihat dari struktur organisasi ini. Sehubungan dengan gambaran di atas maka setiap organisasi baik organisasi besar maupun organisasi kecil termasuk organisasi Pemerintah Desa memerlukan pedoman kerja dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP) yang menjadi pedoman bagi aparaturnya penyelenggara pemerintah desa (Martoyo et al, 2023).

Hal ini agar jalannya pemerintahan baik dalam pelayanan masyarakat maupun dalam pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jika dihubungkan dengan Pemerintah Desa sebagai pelaksana atau implementor dari Program-program pembangunan desa, maka efektivitas dari program pembangunan bisa ditentukan oleh kepatuhan dari para aparaturnya desa terhadap SOP yang telah ditetapkan. Dengan demikian jika aparaturnya desa mematuhi SOP Program Pembangunan Desa maka Program Pembangunan Desa tersebut juga akan berhasil. Sebaliknya jika aparaturnya desa tidak mematuhi SOP Program Pembangunan maka Program tersebut juga tidak akan berhasil.

Mayoritas pembangunan desa di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan didanai oleh Dana Desa, yang merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, karena Dana Desa merupakan dana bantuan kepada pemerintah desa

yang bersumber dari APBN, pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan APBDes Tahun 2022, permen ini akan digunakan oleh pemerintah desa untuk merancang program pembangunan desa. Tidak ada SOP khusus yang mengatur cara Dana Desa digunakan di Kecamatan Putussibau Selatan, terutama di Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe.

Oleh karena itu, Permen Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 digunakan sebagai Prosedur Operasional Standar (SOP) oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan untuk menggunakan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe dalam hal penggunaan SOP untuk Dana Desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa. Ini karena kedua desa tersebut tidak memiliki SOP khusus yang digunakan sebagai dasar untuk menggunakan Dana Desa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Struktur Birokrasi tidak memengaruhi keberhasilan atau keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Desa, terutama Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan.

**e. Pengaruh Disposisi Terhadap Efektivitas implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan.**

Faktor disposisi atau sikap pelaksana ini menjadi faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya program pembangunan yang dikakukan oleh Pemerintah. Hal ini mengingat bahwa pelaksana/implementor yang berhubungan langsung terhadap program pembangunan yang sedang berjalan.

Keberhasilan program pembangunan bisa sangat ditentukan oleh komitmen dari para implementornya. Ada tiga elemen yang berkaitan dengan disposisi pelaksana ini: a). Pemahaman pelaksana dan pengetahuan tentang Program Pembangunan Desa; b). Cara para pelaksana bertindak terhadap implementasi kebijakan (menerima atau menolak kebijakan); dan c). Intensitas respons. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemerintah desa Melapi dan pemerintah desa Ingko Tambe dalam hal pemahaman dan pengetahuan pelaksana tentang Program Pembangunan Desa.

Bagi para implementor atau pelaksana Program Pembangunan Desa di Desa Melapi umumnya para aparatur desa sebagai pelaksana Program Pembangunan Desa dapat dikatakan sudah paham. Demikian juga di Pemerintah Desa Ingko Tambe. Dalam hal respon dari para aparatur desa sebagai implementor Program Pembangunan Desa, kondisi di Pemerintahan Desa Melapi menunjukkan bahwa sebagian besar dari aparatur desa menunjukkan respon yang positif terhadap Program Pembangunan Desa yang dilaksanakan.

Sedangkan di Pemerintahan Desa Ingko Tambe, menunjukkan bahwa sebagian besar dari aparatur desa memiliki respon yang kurang positif terhadap Program Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Ingko Tambe. Kurang meresponnya aparatur desa Ingko Tambe ini dikarenakan mereka kurang berperan dalam melaksanakan Program Pembangunan Desa khususnya Program Bantuan langsung Tunai (BLT). Program BLT ini lebih banyak ditangani oleh

Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Ingko Tambe.

Dengan demikian antara Pemerintahan Desa Melapi dengan Desa Ingko Tambe terdapat perbedaan yang cukup berarti terhadap responsivitas para aparatur desa dalam menangani Program Pembangunan Desa khususnya Program BLT. Sehingga Disposisi atau sikap pelaksana ini berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan (Elyta, 2012).

**f. Pengaruh Kepemimpinan Depala Desa Terhadap efektivitas Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan**

Fungsi pimpinan dalam pelaksanaan program-program pembangunan sangat menentukan dalam mencapai tujuan dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi kepemimpinan diantaranya adalah a). fungsi koordinasi, b). fungsi pengambilan keputusan, c. fungsi komunikasi, d). Fungsi perhatian pada bawahan (Rivai, 2014).

**a. Fungsi Kepemimpinan Dalam Koordinasi**

Pemerintah Desa adalah lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan desa. Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, sinergi di antara dua lembaga desa sangat penting. Oleh karena itu, pimpinan pemerintah desa dan BPD mempunyai tugas dan kewajiban untuk secara konsisten berkolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan, koordinasi yang baik antara kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting.

Kepala Desa dan Ketua BPD berkolaborasi dengan baik dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Desa di Desa Melapi. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam Program Pemulihan Ekonomi Desa, khususnya Program BLT, berjalan dengan baik, yang berarti bahwa Program BLT di Desa Melapi berjalan dengan baik dan tidak ada masalah yang terjadi. Untuk menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Desa, kepala desa dan ketua BPD tidak bekerja sama dengan baik. Akibatnya, hubungan antara pemerintah desa dan BPD menjadi kurang baik.

Akibatnya, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam Program BLT menjadi kurang efektif. Dengan demikian, Program BLT di Desa Ingko Tambe kurang efektif, dengan masalah seperti salah sasaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Dengan demikian, jelas bahwa peran koodinasi pimpinan dalam pelaksanaan Program BLT di Desa Melapi berbeda dari yang dilakukan di Desa Ingko Tambe. Dengan demikian, kepemimpinan kepala desa memiliki peran yang berbeda dalam melaksanakan program BLT.

**b. Fungsi Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan**

Bagi seorang pemimpin yang merupakan pengendali jalannya organisasi bertugas dan berkewajiban melaksanakan aktivitas organisasi menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengendalikan organisasi yang dipimpinnya sudah

barang tentu banyak mengalami hambatan dan permasalahan, untuk itu agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik, maka pimpinan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tersebut dengan berbagai kebijakan sebagai suatu langkah pengambilan keputusan. Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan merupakan langkah penting dalam mengatasi berbagai permasalahan agar stabilitas organisasi yang dipimpinnya dapat terkendali dengan baik.

Dalam hubungannya dengan implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa terutama Program BLT di Kecamatan Putussibau Selatan yang mana salah satu permasalahannya adalah masalah salah sasaran dalam penyaluran BLT. Terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengatasi permasalahan salah sasaran penyaluran BLT ini, antara Kepala Desa Melapi dengan Kepala Desa Ingko Tambe terdapat peredaan yang berarti. Bagi pemerintah Desa Melapi untuk mengatasi permasalahan salah sasaran dalam penyaluran BLT keputusan yang diambil oleh Kepala Desa Melapi adalah dengan melakukan pendelegasian wewenang kepada Kepala Dusun dalam menentukan rumah tangga sebagai kelompok sasaran penerima BLT di wilayahnya, untuk selanjutnya diteruskan untuk diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Padahal umumnya bahwa dalam menentukan rumah tangga sebagai kelompok sasaran penerima BLT kewenangannya dilakukan oleh Kepala Desa. Pengambilan keputusan terhadap pendelegasian wewenang kepada Kepala Dusun ini, menurut Kepala Desa Melapi dikarenakan Kepala Dusunlah yang paling mengetahui rumah tangga mana yang tepat menjadi kelompok sasaran penerima BLT di wilayahnya. Sehingga kalau masih terjadi permasalahan terkait dengan tidak tepat sasaran, maka Kepala Dusun diminta untuk mempertanggungjawabkan permasalahan tersebut. Lain halnya dengan yang terjadi di Pemerintah Desa Ingko Tambe yang mana Kepala Desa mengambil keputusan bahwa kewenangan penentuan kepala keluarga sebagai kelompok sasaran penerima BLT ditentukan oleh Kepala Desa.

Keputusan ini diambil oleh Kepala Desa Ingko Tambe dengan alasan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku pengajuan usulan terhadap rumah tangga sebagai kelompok sasaran penerima BLT dilakukan oleh Kepala Desa. Gambaran di atas dapat dipahami bahwa fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam pengambilan keputusan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Program Pemulihan Ekonomi di Kecamatan Putussibau Selatan.

### **c. Fungsi Kepemimpinan Dalam Komunikasi.**

Fungsi kepemimpinan dalam komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi program pembangunan. Jika pimpinan dapat mengkomunikasikan dengan baik terhadap program pembangunan kepada aparatur sebagai implementor program pembangunan tersebut, maka para aparatur akan memahami program dimaksud dan akhirnya program tersebut dapat terimplementasi dengan efektif.

Dalam hubungannya dengan fungsi komunikasi kepemimpinan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Desa yang dilaksanakan di Kecamatan Putussibau Selatan terutama di Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe dapat dipahami bahwa

fungsi komunikasi kepemimpinan di dua desa tersebut terdapat perbedaan yang berarti. Berikut ini digambarkan tentang pelaksanaan fungsi komunikasi kepemimpinan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Desa di Pemerintah Desa Melapi dan di Pemerintah Desa Ingko Tambe. Di Pemerintahan Desa Melapi, Kepala Desa Melapi telah mengkomunikasikan dengan baik kepada aparatur desa terkait Program Pemulihan Ekonomi Desa yang akan dilaksanakan dan dianggarkan melalui dana desa (Yohanes et al, 2023).

Kondisi kelancaran arus komunikasi yang demikian ini berpengaruh terhadap keberhasilan atau efektivitas implementasi Program BLT ditandai dengan pengakuan Pemerintah Pusat yakni berstatus sebagai Desa Mandiri. Sedangkan di Pemerintahan Desa Ingko Tambe, fungsi komunikasi Kepala Desa kepada aparatur desa sebagai bawahannya belum dilaksanakan dengan baik, Hal ini terjadi karena hubungan yang kurang baik antara Kepala Desa dengan aparatur desa, sehingga menjadikan adanya sekat-sekat komunikasi yang kurang efektif dari Kepala Desa kepada bawahannya.

Kondisi terhambatnya arus komunikasi yang demikian ini berpengaruh terhadap belum efektifnya implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa yang ditandai dengan belum berstatus sebagai Desa Mandiri. Gambaran tersebut dapat dipahami bahwa fungsi komunikasi kepemimpinan kepala Desa berpengaruh terhadap efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putusibau Selatan.

**d. Fungsi Kepemimpinan Dalam Perhatian Pada Bawahan.**

Dalam implementasi program, fungsi kepemimpinan terutama perhatian pimpinan terhadap bawahan menjadi faktor yang dapat menentukan efektivitas implementasi program pemangungan. Hal ini dikarenakan perhatian pimpinan terhadap bawahan menjadi energi yang dapat menumbuhkan semangat kerja para aparatur yang merupakan implementor dari program tersebut. Dengan demikian jika dalam menjalankan kepemimpinan seorang pemimpin menaruh perhatian kepada aparatur yang menjadi bawahannya maka akan berpengaruh pada efektivitas implementasi program tersebut.

Di Pemerintah Desa Melapi, fungsi kepemimpinan kepala desa terutama perhatiannya kepada bawahan, menunjukkan bahwa dalam hubungannya dengan implementasi Program BLT, Kepala Desa sebagai pimpinan begitu memperhatikan bawahannya dalam melaksanakan tugas. Kondisi yang demikian ini menjadikan adanya dukungan dari aparatur desa dalam implementasi Program BLT di Desa Melapi. Hal yang berbeda terjadi di Pemerintah Desa Ingko Tambe, yang mana Kepala Desa sebagai pimpinan kurang memperhatikan bawahannya dalam melaksanakan tugas. Bahkan Kepala Desa Ingko Tambe kurang percaya terhadap aparatur bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Hal ini terlihat dari adanya penggantian jabatan Bendahara Desa kepada keluarga Kepala Desa. Kondisi yang demikian ini membuat aparatur desa kurang mendukung terhadap Program Pemulihan Ekonomi Desa yang diimplementasikan di Desa Ingko Tambe ini.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam perhatiannya kepada bawahan antara Pemerintah Desa Melapi dengan Pemerintah Desa Ingko Tambe terdapat perbedaan yang berarti. Ini mengandung arti

bahwa fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam perhatiannya kepada bawahan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan.

**g. Pengaruh Peran/Dukungan Publik Terhadap Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan**

Dukungan publik merupakan faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan yang dilakukan pemerintah, apalagi program pembangunan yang melibatkan publik dalam proses implementasinya. Jika program pembangunan pemerintah tersebut melibatkan publik, maka peran dari publik menjadi sangat penting dan menentukan terhadap keberhasilan program pembangunan tersebut. Program Pemulihan Ekonomi Desa yang didanai dari Dana Desa merupakan program pembangunan desa yang dalam implementasinya melibatkan publik, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Dengan demikian peran publik begitu penting dalam rangka implelementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa ini.

Dalam hal perencanaan Program BLT yang merupakan salah satu Programm Pemulihann Ekonomi Desa terutama dalam penetapan kelompok sasaran penerima BLT di Desa Melapi dilakukan dengan melibatkan perangkat desa khususnya kepala dusun atau RT. Dan selanjutnya Kepala Dusun atau RT di wilayah Desa Melapi melakukan rapat di tingkat dusun atau RT untuk menentukan kelompok sasaran atau masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima BLT. Di samping itu dalam perencanaan Program BLT juga dilakukan pada Musrenbang di tingkat Desa Melapi yang diikuti oleh berbagai pihak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hal penentuan kelompok sasaran penerima BLT di Desa Melapi ini melibatkan peran publik, sehingga BLT lebih efektif. Sedangkan di Desa Ingko Tambe, penentuan kelompok sasaran penerima BLT didominasi oleh Kepala Desa. Kondisi ini menjadikan publik kurang berperan dalam merencanakan Program BLT, hal ini mengingat bahwa perencanaan Program BLT hanya dilakukan pada saat musrenbang di tingkat Desa Ingko Tambe saja.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hal peran publik terhadap perencanaan Program BLT, antara Pemerintah Desa Melapi dengan Pemerintah Desa Ingko Tambe terdapat perbedaan yang berarti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran publik berpengaruh terhadap keberhasilan atau efektivitas Program Pembangunan desa khususnya Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan

**h. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Dan Teknologi Terhadap Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan**

Dampak dari pandemic covid 19 sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu termasuk juga di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Putussibau Selatan. Pada umumnya dampak dari pandemi covid 19 di Kecamatan Putussibau Selatan adalah terjadinya penurunan kondisi ekonomi masyarakat. Untuk itu, Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menginstruksikan penggunaan Dana Desa agar lebih difokuskan pada Program Pemulihan ekonomi Desa. Dengan demikian implementasi dari Program Pembangunan Desa yang

didanai bersumber dari Dana Desa di Desa-desanya dalam wilayah Kecamatan Putussibau Selatan juga diarahkan pada Program Pemulihan Ekonomi Desa (Elyta et al, 2021).

Pada dasarnya kondisi sosial ekonomi pasca pandemi covid 19 tersebut di Desa Melapi dan juga di Desa Ingko Tambe tidak terdapat perbedaan yang berarti. Dengan juga dalam hal teknologi yang digunakan terhadap Program-program pembangunan desa terutama Program Pemulihan Ekonomi Desa dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan yang berarti antara Desa Melapi dan Desa Ingko Tambe. Sehubungan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kondisi sosial ekonomi dan juga teknologi kurang berpengaruh terhadap keberhasilan Program Pembangunan Desa khususnya Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan.

#### **5.4 Faktor Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa Di Kecamatan Putussibau Selatan.**

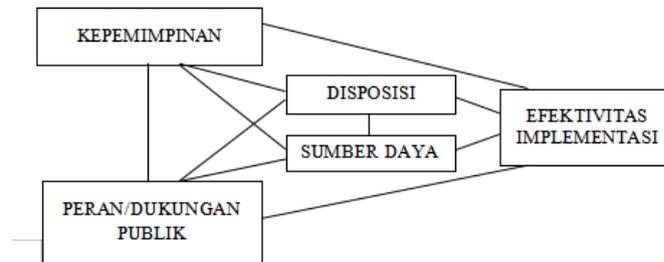
Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa keberhasilan atau efektivitas dari Program Pembangunan Desa khususnya Program Pemulihan Ekonomi Desa dipengaruhi oleh banyak faktor atau variabel. Namun demikian berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan adalah a). Sumber daya, b). Disposisi, c). Kepemimpinan, dan d). Peran/dukungan publik.

##### **e. Model Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Di Kecamatan Putussibau Selatan**

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau efektivitas implementasi Program Pembangunan khususnya Program Pemulihan Ekonomi di Kecamatan Putussibau Selatan terdiri dari 4 faktor yaitu a). Faktor Sumber daya, b). Faktor Disposisi atau sikap pelaksana; c). faktor kepemimpinan; dan d). faktor peranan publik. Ke empat faktor yang merupakan variabel bebas tersebut secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap keberhasilan atau efektivitas implementasi Program Pembangunan khususnya Program Pemulihan Ekonomi di Kecamatan Putussibau Selatan (Yohanes et al, 2023).

Di samping itu, ke empat faktor atau variabel bebas tersebut juga saling berkorelasi atau berpengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Artinya bahwa faktor kepemimpinan berkorelasi dengan faktor disposisi atau sikap pelaksana, faktor kepemimpinan juga berkorelasi dengan faktor sumber daya, faktor kepemimpinan juga berkorelasi dengan faktor peran publik dan sebaliknya. Faktor peran publik berkorelasi atau berpengaruh terhadap disposisi atau sikap pelaksana, faktor peran publik juga berkorelasi atau berpengaruh terhadap faktor sumber daya dan sebaliknya. Faktor Disposisi berkorelasi atau berpengaruh terhadap faktor sumber daya dan sebaliknya. Ke empat faktor di samping berpengaruh langsung terhadap keberhasilan atau efektivitas implementasi Program Pemulihan Ekonomi di Kecamatan Putussibau Selatan, ke empat faktor tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap keberhasilan atau efektivitas implementasi Program Pemulihan

Ekonomi di Kecamatan Putussibau Selatan. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dikemukakan model implementasi Program Pemulihan Ekonomi di Kecamatan Putussibau Selatan sebagai berikut :



## Kesimpulan

- a. Terdapat 4 faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program pemulihan ekonomi desa di Kecamatan Putussibau Selatan, yakni faktor sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, kepemimpinan dan faktor peran publik. Ke empat faktor tersebut disamping secara sendiri-sendiri berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa, juga berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas implementasi program tersebut. Namun demikian terdapat 5 faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program pemulihan ekonomi di Kecamatan Putussibau Selatan, yakni komunikasi, dukungan Pemerintah, struktur birokrasi, pendampingan, dan faktor kondisi sosial ekonomi.
- b. Pemerintah desa Ingko Tambe dalam memanfaatkan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa masih kurang kreatif, hal ini terlihat dari besarnya APBDes yang menganggarkan pada pos pengeluaran sebagai cadangan belanja tidak terduga yang jumlahnya sangat besar yakni mencapai mencapai Rp. 386.000.000,00.
- c. Pada aspek sumber daya manusia sebagai pelaksana program pembangunan yang sekaligus pelaksana pemerintahan desa, terdapat perbedaan yang menyolok antara desa Melapi dengan desa Ingko Tambe. Desa Melapi jalannya pemerintahan didukung oleh aparatur desa yang sebagian besar berpendidikan SMA, namun telah berhasil berstatus sebagai desa mandiri. Sedangkan di desa Ingko Tambe jalannya pemerintahan dan pembangunan sebagian bear didukung oleh aparatur desa yang berpendidikan Sarjana Strata-1, namun desa ini belum berstatus sebagai desa mandiri. Sehingga tingkat pendidikan formal kurang berpengaruh terhadap efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Desa di Kecamatan Putussibau Selatan.
- d. Sistem pemerintahan di Desa Melapi dapat dikatakan berjalan dengan baik, hubungan yang harmonis antara pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif dengan BPD sebagai lembaga legeslatif. Sedangkan sistem pemerintahan di desa Ingko Tambe berjalan kurang baik, karena hubungan antara pemerintah desa dengan BPD terjadi kurang harmonis.
- e. Di desa Ingko Tambe, aparatur pemerintah desa sebagai pelaksana program kurang diberi kewenangan oleh Kepala Desa, sehingga bersikap kurang mendukung pelaksanaan program pembangunan di desa ini.
- f. Di desa Ingko Tambe, publik kurang berperan atau terlibat dalam pembangunan khususnya perencanaan. Usulan terhadap perencanaan pembangunan dalam musrenbang

didominasi oleh Kepala Desa.

**Rekomendasi Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :**

- a. Pendamping desa dalam melakukan pendampingan terhadap desa hendaknya tidak menyamakan intensitas antara desa satu dengan desa yang lainnya. Intensitas pendampingan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing desa.
- b. Pemerintah desa Ingko Tambe terutama Kepala Desa seyogyanya lebih kreatif dalam mengalokasikan sumber dana pembiayaan pembangunan desanya. Anggaran cadangan sebagai pengeluaran tidak terduga jangan terlalu besar dan sebaiknya dialokasikan pada belanja modal, seperti penambahan modal usaha bagi Badan Usaha Milik Desa.
- c. Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi Program Pemulihan ekonomi Desa, seyogyanya terjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan BPD sehingga terjadi sinergi yang akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Program Pemulihan ekonomi Desa.
- d. Dalam menjalankan pemerintahan desa dan pembangunan, seyogyanya Kepala Desa percaya dan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada stafnya dalam pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Sehingga memotivasi aparatur dalam melaksanakan Program Pembangunan Desa dengan bertanggung jawab.
- e. Kepala Desa agar lebih meningkatkan peran atau keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hal ini agar pelaksanaan pembangunan desa mendapat dukungan publik sehingga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Program Pemulihan Ekonomi Desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku-Buku

- Black, James A., dan Dean J. Champion. (1999). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Cetakan kedua. Terjemahan E. Koeswara, Dira Salam, Alfin Ruzhendi. Bandung : Refika Aditama.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition, California: Sage Publications Inc.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. : Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Marlee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Cetakan ketiga. Terjemahan Ricky Istamto. Editor. Nasir Budiman. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy*. Jakarta : Kencana.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Purwanto, Erwan Agus; Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ripley, Randall B., and Grace A. Franklin. 1982. Bureaucracy and Policy Implementation. Illinois : The dorsey Press Homewood.
- Silalahi, Ulber. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT Refika Aditama.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data. Terjemahan.Muhammad Shodiq & Imam Muttaqiem. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- , 2013, AnalisisKebijakan Publik, Konsep, Teori Dan aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- , 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Penerbit CV.Alfabeta.
- Tachjan. 2008, Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI.
- Umar, Husein. 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Rineka Cipta
- , 1990. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implemetasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- , 2016. AnalisisKebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Surabaya : Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.

### **Hasil Penelitian /Jurnal/Makalah**

- Aisyah, S., Elyta, E., & Fahriansyah, O. (2022). Analisis Kebijakan Presiden Bashar al-Assad dalam Menangani Masalah Keamanan di Suriah Tahun 2019-2020. SOVEREIGN: Jurnal Hubungan Internasional, 4(2).
- Almuthahar, H., Rahmaniah, S., & Elyta, E. (2019, September). The Role of Local Institutions To the Embodiment of Reconciliation in Singkawang. In International Conference on Environmental Awareness for Sustainable Development in conjunction with International Conference on Challenge and Opportunities Sustainable Environmental Development, ICEASD & ICCOSED 2019, 1-2 April 2019, Kendari, Indonesia.
- Al Qadrie, S. R. F., Lutfie, R. Z., Olifiani, L. P., & Eyta, E. (2023). Pengembangan Demokrasi Ekonomi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pontianak. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 149–158.
- Amalia, A. D., Jamaliah, J., & Elyta, E. (2023). The Crisis of Liberal International Order and The Western Imperialism. Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science, 3(02), 490–499.
- Antir, A., Elyta, E., & Saherimiko, S. (2024). Martin Rantan-Farhan Political Communication In The Regional Head Election In Ketapang District, West Kalimantan Province 2020. International Journal of Education, Vocational and Social Science, 3(01), 179–201.
- Aryanti, M. W., Haryaningsih, S., & Elyta, E. (2023). Indonesia Raya Movement Party Political Strategy to Fulfill Women’s Representative in Regional People’s

- Representative Council Pontianak City Ahead of The 2024 Elections. *International Journal of Education, Vocational and Social Science*, 2(04), 169–183.
- Chainar, C., Purnama, D. T., Elyta, E., Apriyanto, D., & Marini, M. (2023). Sociocultural Linkages as Causes of Stunting Village in the Community of Tanjung Village, Mempawah Hilir District, Mempawah District. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 321–331.
- Darwin, Muhadjir. 1995. Implementasi Kebijakan Publik (Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial). Yogyakarta : PPK UGM.
- Elyta, E. (2018). Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur). *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 86-95.
- Elyta, E. (2012). Penanggulangan Perdagangan Perempuan Di Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat: Perspektif Keamanan Manusia. *Indonesian Journal of Dialectics*, 2(2).
- Elyta, U. N. (2018). Border Diplomacy in Handling Disputes on Tanjung Datu (Case Between Indonesia and Malaysia). *Prosiding Vennas AIHII*, 9, 157.
- Elyta, Ahmad, M. Z., Jamaliah, Mujiono, D. I. K., Islam, R., & Daud, R. (2023). Impacts of the COVID-19 pandemic on export commodity trading [Special issue]. *Journal of Governance & Regulation*, 12(3), 274–284. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i3siart9>
- Elyta, E., Al Qadrie, S. R. F., & Olifiani, L. P. (2023). State Responsibility Model Through Foreign Policy in Handling the Impact of Covid-19 in the Globalization Era. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(1).
- Elyta, Elyta, et al. (2024) "Analysis of International Cooperation in Exports at the Entikong Indonesia-Malaysia Border." *International Journal of Business and Quality Research* 2.01 (2024): 62-77.
- Elyta, Elyta, et al. (2024). "UTILIZATION OF BIG DATA ON ELECTION POLITICS INDONESIA IN INDUSTRY 4.0." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 8.2 (2023).
- Elyta, Elyta. (2021). "Penanganan Konflik Melalui Keamanan Di Kalimantan Barat Indonesia." *Jurnal Politik Profetik* 9.2 (2021): 330-343.
- Elyta, Elyta. (2020). "Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9.2 (2020): 100-115.
- Elyta, E. (2022). Soft Power Model To Strengthen Human Security At The Temajuk Border. *Sosiohumaniora*, 24(2).
- Elyta, Elyta, et al. (2022). "Sosialisasi Politik Digital Indonesia untuk Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Antar Negara." *Jurnal Buletin Al-Ribaath* 19.2 : 201-210.
- Elyta, E., & Darmawan, D. (2021). Education Politics: Learning Model through Google Apps in Office Administration Management of Diploma Students. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(5), 2152-2160.
- Elyta, E., & Herlan, H. (2021). Politics of Harmony, Social Capital and Tolerant Cities. *Journal of Finance & Banking Review (JFBR)*, 6(1).
- Elyta, E., Jamaliah, J., & Ahmad, M. Z. (2023). Entrepreneurship Innovation in Strengthening Economic Security on The Temajuk Border of West Kalimantan Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 7(1), 2–45.
- Elyta, E., & Kartikasari, W. (2021, January). Strengthening the Border Tourism in Sambas

- District of West Kalimantan Indonesia in the Covid-19 Pandemic: A Political Boundaries Perspective. In 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020–Social, Humanity, and Education (ICoSIHESS 2020) (pp. 192-202). Atlantis Press.
- Elyta, E., Olifiani, L. P., Afhiani, S. N., & Usmulyadi, S. (2023). UTILIZATION OF BIG DATA ON ELECTION POLITICS INDONESIA IN INDUSTRY 4.0. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 8(2).
- Elyta, E., & Razak, A. (2019). The role of weavers woman in strengthening nationalism case study in sajingan besar frontier, Indonesia. *Sosiohumaniora*, 21(1), 40-45.
- Elyta, Elyta, Ishaq Rahman Abi Sofyan, and Ulyly Nuzulian. (2018). "Nasionalisme Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Barat Indonesia." *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1.2 : 311-322.
- Elyta, Elyta, Dadang IK Mujiono, and Uni W. Sagena. (2022). "Facing The Dangers in Indonesia's Waters: Government's Efforts in Proposing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing as Transnational Organized Crime." *Intermestic: Journal of International Studies* 6.2 : 336-352.
- Elyta, Elyta. (2021). "Penanganan Konflik Melalui Keamanan Di Kalimantan Barat Indonesia." *Jurnal Politik Profetik* 9.2 : 330-343.
- Elyta, E., and Fuzy Firda Zhan. (2021). "The Role of Non-Government Actors in Realizing Ecopreneurship Based on Environmental Security." *Int J Soc Sci Hum Res* 4 : 2595-9.
- Elyta, E., Herlan, H., & Burhanduddin, B. (2020). Political Participation of Street Vendors and Government Officials (Study in Pontianak City Indonesia). *Technium Social Sciences Journal*, 9, 472-478.
- Elyta, E., Rahmaniah, S. E., & Ramdani, H. (2021). China's Policy to Close Borders to Prevent the Spread of the Second Wave of Covid-19 Virus. *Journal of Islamic World and Politics*, 5(1), 163-178.
- Elyta, E., & Sahide, A. (2021). model of creative industry management in border areas to improve bilateral cooperation In Indonesia and Malaysia. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1974670>
- Elyta, E., Wiko, G., Fahrana, Y., Rahman, I., & Firda Zhan, F. (2021). Model-Based Waste Management Handling Angkuts Application to Smart City: The Perspective of Human Security. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*.
- Fathun, F., & Elyta, E. (2023). From Shadows to Spotlight: Analyzing Protodiplomatic Strategies in The 2022 Russia-Ukraine Crisis. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 351–372.
- Haryaningsih, S., Elyta, E., Nikodimus, N., & Apriyanto, D. (2023). Benefits of Accounting Information Systems to Improve Service Quality at Regional General Hospital (RGH) dr. Agoesdjarm Ketapang District. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(3), 482–496.
- Islam R., Herlan, Elyta, Daud, R., Fakhrorazi, A., & Sultana, S. (2023). Analysis of the impact of COVID-19 on the global political economy. *Corporate & Business Strategy Review*, 4(3), 127–138. <https://doi.org/10.22495/cbsrv4i3art13>
- Jamaliah, J., Rusmita, S., Elyta, E., Rosyadi, R., & Islahiyah, D. (2022). THE ROLE OF CRIME IN MODERATING THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH AND POVERTY: THE CASE OF WEST KALIMANTAN. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan*

*Kewirausahaan, 11(1), 84-99.*

- Martoyo, M., Herlan, H., Sukanto, S., Sikwan, A., Elyta, E., & Al Vayed, D. (2023). JUSTIFIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MEMBERIKAN PELUANG PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), 12(3), 283–293.*
- Martoyo, M., Elyta, E., Herlan, H., & Arifin, A. (2020). Economic development and sustainable human resources by supply chain management in government towards in west kalimantan Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management, 9(2), 1054-1063.*
- Martoyo; Elyta; Herlan; Sujendra, Bima. (2021). Deliberative Politics towards of The Government Policy in West Kalimantan Indonesia. *Technium Soc. Sci. J., 16, 520.*
- Nani, Y. N., Abdussamad, Z., Elyta, E., & Tohopi, R. (2024, January). NPA, the New Paradigm of Public Service Overview of Public Policy Implementation. In 2nd International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST 2023) (pp. 148-154). Atlantis Press.
- Ningrum, S. A., Elyta, E., & Nuzulian, U. (2024). Indonesian Foreign Policy in the Case of Illegal Fishing of Vietnamese Fishermen in the Natuna Islands on the Border of Indonesia and Vietnam in 2014-2021. *Journal of Business Management and Economic Development, 2(01), 201–214.*
- Olifiani, L. P., & Elyta, E. (2023). The G-20 Presidency as an External Political Instrument to Realize Good Environmental Governance in Indonesia. *International Journal of Education, Vocational and Social Science, 2(02), 232–251.*
- Purwanto, Erwan Agus. 2004. “Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik”. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Volume 8. Nomor 2. Nopember 2004:28-42.* Yogyakarta. MAP-UGM. Van Meter, Donald S., Carl E.
- Rahman, I., Elyta, P. L., & Amaliah, N. (2021). A. Potential for Strengthening Human Security at the Paloh Border, Sambas Regency, Indonesia.
- Rahmaniah, S. E., Elyta, E., Almutahar, H., Niko, N., Fitriani, N. A., Hasni, M. M., & Sari, D. (2023). Unvealing Sex Addiction Among Child Victims of Sexual Crimes In Indonesia. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science, 3(04), 1330–1349.*
- Rahmaniah, S. E., Musa, P., Alamri, A. R., Patriani, I., Elyta, E., & Abd Azis, M. A. (2022). Figuring Bidai Craftswomen’s Future in The Upcoming Asean Economic Community (AEC): Case Study in The Borderland Of Jagoibabang. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan, 6(1), 63-76.*
- Sundari, C., Elyta, E., Isdairi, I., & Yohanes, Y. (2023). Traditional Forests Create Government Ecology in Jambi Province. *Jurnal Ilmu Lingkungan, 21(3), 487-494.*
- Supiandi, H., & Elyta, E. (2023). Representasi Nilai Budaya Bahtuk: Film Dokumenter Sungkung Warisan Budaya di Tengah Rimba. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 5346–5355.*
- Usmulyadi, S., Elyta, E., & Al Qadrie, S. R. F. (2024). Implementation Of Legislation Functions In The Process Of Making Regional Regulations Initiative Of Regional People’s Representative Council Of Singkawang City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science, 2(01), 121–131.*
- Van Horn. 1975. “The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework”. *Administration & Society. (Jurnal). Vol. 6 No. 4 February 1975. Ohio State*

University : Sage Publication, Inc.

- Yohanes, Y., Al Qadrie, S. R. F., Elyta, E., Olifiani, L. P., & Kurniawan, C. (2023). E-Service in government sector: To what extent has NTB. care affected as a smart citizen reporting site for raising government performance. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 440, p. 04010). EDP Sciences.
- Yohanes, Y., Elyta, E., Zulkarnaen, Z., & Kurniawan, C. (2023). Factors Affecting Community's Intention to Use Lestari Applications Through the Umega Model. *REFORMASI*, 13(2), 247–260.

### **Peraturan Perundangan :**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.  
Permendes No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.  
Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.